

FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI PEREMPUAN BERAKTIVITAS DALAM PARTAI POLITIK

Oleh: Nurhamni

ABSTRAK

Motivasi perempuan beraktivitas pada partai politik didasarkan pada motivasi yang bersumber dari dalam dirinya maupun di luar dirinya, yang dikenal dengan motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal jika dikaitkan dengan teori Maslow ada 5 kebutuhan yaitu kebutuhan dasar, keamanan, sosial, penghargaan dan pengembangan diri. Sedangkan motivasi eksternal dapat dilihat pada motivasi yang bersumber dari lingkungan sendiri yaitu keluarga dan motivasi di luar lingkungan adalah teman.

Kata Kunci : Motivasi dan Partai Politik

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan berbagai aktivitas, dituntut dilakukannya peningkatan kinerja sumberdaya manusia secara terus menerus agar terwujud sumber daya manusia profesional, kreatif dan inovatif sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia berkualitas unggul sehingga tangguh dalam menghadapi tantangan dan mampu memanfaatkan peluang.

Salah satu kebijaksanaan pembangunan yang menyangkut pengelolaan sumber daya manusia, yaitu program pemberdayaan perempuan sebagai bagian penting dan karena jumlah perempuan yang cukup besar dimana Jumlah penduduk perempuan Indonesia mencapai 52 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan, kuantitas

penduduk perempuan merupakan potensi sumber daya yang perlu diperhitungkan dalam arti perlu diberdayakan sebagai pelaku atau subjek pembangunan apalagi dalam era otonomi daerah.

Hal tersebut di atas, dipertegas lagi berdasarkan Instruksi Presiden Tahun 2000 tentang Jender menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan. Jadi perempuan diharapkan dapat berperan lebih aktif tidak saja sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaku dan penikmat pembangunan dalam segala bidang pembangunan.

Berdasarkan fenomena yang ada sekarang ini bahwa untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada maka salah satu sumber daya manusia yang paling potensial adalah perempuan. Oleh karena itu perempuan perlu dilibatkan dalam kegiatan di sektor publik. Hal ini didukung oleh pendapat Sedarmayanti (2004) bahwa salah satu program pemberdayaan perempuan yang menjadi kebijakan pemerintah selama ini yaitu untuk meyetarakan masyarakat termasuk antara laki-laki dan perempuan.

Dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut maka pemberdayaan perempuan sangat diharapkan dengan upaya memberi motivasi kepada perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan. Perempuan berpartisipasi aktif (subjek) yang tidak sekedar menjadi objek pembangunan serta meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan jumlah posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap program pembangunan, baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Untuk menjadi perencana, pelaksana dan pemantau pembangunan maka potensi yang harus dimiliki oleh perempuan adalah memiliki kemampuan dan kemauan serta kepedulian kepada masyarakat, agar perempuan dapat terakses dalam berkomptensi dengan kaum laki-laki, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai

wujud motivasi perempuan untuk aktif dalam partai politik berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 2002 pasal 2 menjelaskan bahwa porsi perempuan untuk duduk dalam berbagai bidang pembangunan 30 % dari jumlah anggota.

Keikutsertaan perempuan dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi dan politik dewasa ini memicu kesadaran masyarakat, khususnya kaum laki-laki untuk lebih arif melihat kecenderungan ini, sehingga pembagian kerja atas jenis kelamin, perbedaan bukan pada apa yang bisa dan harus dikerjakan, melainkan dengan cara bagaimana perempuan dan laki-laki melihat fenomena dari apa yang dikerjakan, apakah itu, bermanfaat pada dirinya, keluarganya maupun bagi negaranya .

Dengan adanya motivasi pemerintah tersebut maka dapat dikatakan bahwa perempuan mulai tertarik dan mengalami kemajuan sedikit demi sedikit, karena sudah ada perempuan yang memiliki motivasi untuk ikut berperan dalam berbagai pembangunan terutama dalam pembangunan politik, namun masih dianggap kurang. Hal ini terbukti dengan adanya wakil perempuan yang menjadi Caleg dari berbagai Partai yang ada di setiap Daerah.

PEMBAHASAN

Untuk memahami pengertian motivasi tersebut maka dapat diungkapkan beberapa pendapat dari para ahli antara lain George Terry dalam Hasibuan (2003) menyatakan bahwa “ motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan tindakan. Kemudian diperjelas oleh Hasibuan bahwa motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Selanjutnya Gray dalam Winardi (2004) berpendapat bahwa motivasi adalah merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap

antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.

Dengan adanya beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan salah satu unsur yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Perilaku seseorang itu sebenarnya dapat dikaji sebagai saling interaksinya atau ketergantungannya/interdependensinya beberapa unsur yang merupakan suatu lingkaran dalam motivasi. Unsur-unsur itu meliputi motivasi dan tujuan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miftha Thoha yang mengatakan bahwa:

Istilah motivasi dipakai silih berganti dengan istilah-istilah lainnya, seperti yang diungkapkan oleh teori motivasi Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow dan Teori Motivasi dari David C. McClelland.

a. Teori Motivasi Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Apabila pegawai kebutuhannya tidak terpenuhi maka pegawai tersebut akan menunjukkan perilaku kecewa. Sebaliknya, jika kebutuhannya terpenuhi maka pegawai tersebut akan memperlihatkan perilaku yang gembira sebagai manifestasi dari rasa puasnya. Kebutuhan merupakan fundamen yang mendasari perilaku pegawai. Kita tidak mungkin memahami perilaku pegawai tanpa mengerti kebutuhannya. Abraham Maslow mengemukakan bahwa hirarki kebutuhan manusia adalah sebagai berikut:

- Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan makan, minum, perlindungan fisik, bernafas, seksual, Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat terendah atau disebut sebagai kebutuhan yang paling dasar.
- Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, bahay, pertentangan, dan lingkungan hidup.

- Kebutuhan untuk rasa memiliki yaitu kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai.
- Kebutuhan akan harga diri yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain.
- Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri yaitu kebutuhan untuk menggunakan kemampuan dan potensi.

b. Teori Motivasi Prestasi David C.McClelland

David adalah seorang psikologi bangsa Amerika dan Universitas Harvard, dalam teori motivasinya mengemukakan bahwa produktivitas seseorang sangat ditentukan oleh “Virus mental” yang ada pada dirinya. Virus mental adalah kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk mampu mencapai prestasinya secara maksimal. Virus mental yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) dorongan kebutuhan yaitu Kebutuhan untuk berprestasi, Kebutuhan untuk memperluas pergaulan, Kebutuhan untuk menguasai sesuatu.

Berdasarkan teori David tersebut di atas, yang sangat penting dibina adalah virus mental seseorang dengan cara mengembangkan potensi mereka melalui lingkungan kerja secara efektif agar terwujudnya produktivitas perusahaan yang berkualitas tinggi dan tercapainya tujuan utama organisasi. David menyebutkan bahwa manusia yang berprestasi dapat dilihat dari segi karakteristik yang dimilikinya yaitu::

- Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi
- Berani mengambil dan memikul resiko
- Memiliki tujuan yang realistik
- Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuan.
- Memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam semua kegiatan yang dilakukan

- Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

Dalam analisa politik moderen partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, yang akhir ini banyak dipelajari terutama dan hubungannya dengan negara-negara yang sedang berkembang. Mariam Budiardjo (1981) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah “Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Jadi pendapat tersebut merupakan suatu hal yang dilakukan oleh seseorang terutama dalam memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Selain pendapat tersebut di atas, masih ada beberapa pendapat dari para ahli, dimana penulis mengutip dari Buku Miriam Budiardjo (1981) antara laian :

1. Herbert Mc Closky dalam Miriam Budiardjo berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
2. Norman H.Nie dalam Miriam Budiardjo berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan /atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.
3. samuel P. Huntinton dalam Miriam Budiardjo berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk

mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Setelah melihat beberapa definisi partisipasi politik tersebut maka dapat dikatakan bahwa anggota masyarakat yang partisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan perkataan lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek, dan ini dinamakan *political efficacy*. Miriam Budiardjo (1981) berpendapat bahwa salah satu sarana untuk berpartisipasi adalah partai politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Jika mencermati definis tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa paratatai politik merupakan suatu organisasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai komponen bekerjasama dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu Miriam Budiardjo menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut tentunya partai politik secara demokratis mampu menyelenggarakannya ada beberapa fungsi yang harus dijalankannya yaitu berfungsi sebagai sarana komunikasi, sebagai jembatan, berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana pengatur konflik. Apabila dilihat dari fungsi sebagai sarana komunikasi bahwa kenyataan yang ada sekarang dalam sistem pemerintahan sebaiknya dilaksanakan dari bawah ke atas, yaitu yang diperintah kepada yang memerintah. Akan tetapi ada juga komunikasi terlaksana dari atas ke bawah yaitu dalam

hal partai politik turut memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi dialog antara dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, di mana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara pemerintah dan warga masyarakat.

Partai politik jika dilihat dari fungsinya sebagai jembatan, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua lapisan masyarakat dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik merupakan suatu proses di mana seseorang memperoleh pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat di mana ia berada. Namun tidak boleh disangkal bahwa ada kalanya partai mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan nasional. Loyalitas yang dijakarkan adalah loyalitas kepada partai, yaitu melebihi loyalitas kepada negara. Dengan demikian dia mendidik pengikut-pengikutnya untuk melihat dirinya dalam konteks yaitu sangat sempit. Pandangan ini malah menimbulkan pengkotak-kotakan dan tidak membantu proses integrasi.

Partai politik dilihat dari fungsinya sebagai rekrutmen politik yaitu merupakan proses melalui mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan seperti buruh tani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas.

Partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik pada saat terjadi pertikaian antara suku, etnis, status dan sosial ekonomi atau agama, maka atas bantuan partai politik untuk mengatur sedemikian rupa sehingga akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin.

Jika dianggap bahwa perempuan diharapkan ikut berpartisipasi dalam pembangunan politik maka terlebih dahulu penulis mengungkapkan pengertian politik menurut Miriam Budiardjo

(1993) bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber dan resource yang ada.

Jadi politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai-bagai kelompok termasuk parati politik dan kegiatan orang eeorang, karena paratai politik merupakan sarana untuk berpartisipasi seseorang dalam bentuk kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Menurut Sigmund Neumann dalam Miriam Budiardjo (1981) mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian paratai politik merupakan perantara yang besar menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi menurut Miriam Budiardjo (1991) yaitu berfungsi sebagai sarana komunikasi, sebagai perantara, sebagai rekrutmen, sebagai pengatur konflik.

Partai politik sebagai sarana komunikasi politik Arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah artinya berjalan dari atas ke

bawah dan dari bawah ke atas. Kedudukan partai dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara mereka yang memerintah dengan mereka yang diperintah. Selain sebagai sarana komunikasi juga partai dijadikan sebagai jembatan atau perantara, seperti halnya kebijakan pemerintah perlu diebarluaskan kepada masyarakat dan dipihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat, karena partai juga dapat dikatakan sebagai sara sosialisasi politik yang mengarah pada pembinaan warga negara ke arah kehidupan dan cara berfikir yang sesuai dengan pola yang ditentukan oleh partai, seperti proses sosialisasi dilaksanakan di sekolah, organisasi pemuda dan sebagainya.

Partai politik juga dapat berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang lain yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kemudian partai politik sebagai pengatur konflik dalam rangka demokratis yang masyarakatnya bersifat terbuka adanya perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Akan tetapi dalam masyarakat yang sangat heterogen sifatnya, maka perbedaan pendapat ini, apakah ia berdasarkan perbedaan etnis, status, sosial ekonomi atau agama, mudah sekali mengandung konflik. Pertikaian-pertikaian semacam ini dapat diatasi dengan bantuan partai politik, sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa, sehingga akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin.

Miftha Thoha (2004) berpendapat bahwa partai politik merupakan organisasi yang berhubungan dengan kekuasaan melalui cara pemilihan yang demokratis. Oleh karena itu partai politik bekerja melalui mekanisme perwakilan dan pemerintahan.

Fredrich dalam Miriam Budiardjo (1981) menjelaskan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan

ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil maupun materil.

Jadi secara umum bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan tersebut untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik, yang mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum, seperti menjadi anggota dalam golongan partai, kelompok penekan, duduk dalam lembaga politik (DPR) atau anggota legislatif atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan, seperti ikut diskusi, kampanye dan sebagainya.

Slamet Y. (1989) dalam bukunya yang berjudul, “Konsep-konsep Dasar Partisipasi Sosial”, menyatakan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai pembangunan masyarakat yang mandiri, perwakilan, mobilisasi sosial, pembagian sosial yang merata terhadap hasil-hasil pembangunan, penetapan kelembagaan khusus, demokrasi sosial dan politik, reformasi sosial, atau bahkan disebut revolusi sosial. Selanjutnya Moh. Rasyid (1989) , menyatakan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan dari definisi partisipasi yaitu:

1. Partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan individu, lebih dari semata-mata keterlibatan jasmaniah dalam situasi kelompok.
2. Individu tadi bersedia memberikan sumbangan misalnya berupa buah pikiran, barang, jasa uang dan sebagainya bagi usaha pencapaian tujuan kelompok.
3. Membagi tanggung jawab bersama di antara mereka.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Coralie Bryant dan Louis G. White (1989) memandang partisipasi atau peran serta masyarakat sebagai kemampuan atau (empowerment) dalam proses pembangunan. Dikatakan bahwa peran serta merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain. Peran serta berarti perhatian mendalam terhadap perbedaan dan perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat. Peran serta adalah kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak lain untuk suatu kegiatan.

Konsep partisipasi tersebut di atas dalam kegiatan pembangunan politik adalah sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang dijunjung tinggi masyarakat dalam pembangunan yang di dasarkan atas kreatifitas dan otoaktifitas yang hanya dapat terjadi apabila masyarakat terutama perempuan sudah memahami dan menghayati tujuan-tujuan, tata cara pembangunan dan merasakan bahwa pembangunan itu sebagai kebutuhan masyarakat sendiri. Menggerakkan partisipasi masyarakat terutama perempuan dalam pembangunan itu harus sesuai dengan prinsip demokrasi, azas kekeluargaan dan kegotong royongan.

Diana Conyers (1991) menyebutkan ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat termasuk perempuan mempunyai sifat yang sangat penting:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai suatu proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

3. Alasan yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam hal ini perempuan tidak datang dengan sendirinya tetapi harus diusahakan secara terus menerus atau kontinyu dan diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Dengan usaha tersebut diharapkan masyarakat akan mempunyai sikap, orientasi, persepsi selaku subjek dalam penyelenggaraan pembangunan. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan khususnya pada pembangunan politik.

Alex S. Nitisemito (1979) menulis mengenai cara-cara meningkatkan partisipasi, sebagai berikut:

- Mengikutsertakan mereka secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan.
- Menjelaskan tentang maksud dan tujuan keputusan perencanaan yang akan dikeluarkan.
- Meminta tanggapan dan saran tentang keputusan dan perencanaan yang akan dikeluarkan.
- Meminta informasi tentang segala sesuatu dari mereka dalam usaha membuat keputusan dan perencanaan.

Pernyataan tersebut di atas memberikan suatu makna bahwa kesediaan masyarakat termasuk perempuan untuk bergerak dan berpartisipasi dapat dicapai apabila kegiatan yang dilakukan betul-betul menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Apabila partisipasi masyarakat telah mampu digerakkan, maka langkah selanjutnya adalah berusaha meningkatkan kadar keikutsertaannya agar semakin tinggi, seperti halnya perempuan dimana eksistensi perempuan ditengah masyarakat ini masih sitematis, dalam arti masih terdapat perbedaan sudut pandang tentang

keberadaan perempuan dalam kaitannya dengan peran serta tanggung jawab langsung sebagai anggota masyarakat.

Sampai saat ini kaum pria maupun perempuan sendiri masih ada yang menganggap perempuan adalah makhluk Tuhan yang sangat special dimana perempuan dianggap sebagai dewi, yang harus dibela, dilindungi, tak dapat mandiri, dan selalu dalam ketergantungan dan hanya dapat berfungsi atau berperan sebagai penjaga rumah tangga dengan segala lainnya serta menjadi pelengkap aktivitas sosial kemasyarakatan.

Tanggapan tersebut di atas, perlu mendapat perhatian dari semua pihak bahwa perempuan tidak selamanya dipandang sebagai peminisme, akan tetapi perempuan bisa duduk bersama dengan laki-laki dalam melaksanakan semua kegiatan pembangunan terutama pembangunan di bidang politik, sehingga perempuan hendaknya mampu menempatkan posisinya ditengah masyarakat terutama turut mengambil bagian dalam mengantisipasi era globalisasi masa kini maupun masa mendatang.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEREMPUAN BERAKTIVITAS PADA PARTAI POLITIK .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam tulisan ini penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam meningkatkan motivasi perempuan beraktivitas pada partai politik dapat dilihat dari dua factor yaitu.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam melaksanakan kegiatan dapat dilihat dua faktor yaitu faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam organisasi yang mempunyai andil cukup besar terhadap peningkatan motivasi perempuan, karena motivasi perempuan dalam lingkungan organisasi mempunyai keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi, apalagi program pemerintah mengharapakan

perempuan mendapatkan porsi 50 dari jumlah anggota. Aspek-aspek yang mempengaruhi antara lain pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja, apabila hal ini dimiliki oleh setiap individu maka setiap individu akan memiliki motivasi beraktivitas pada Partai politik yang sangat memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan perempuan yang ikut beraktivitas pada paratai politik mengatakan bahwa, namun perempuan memiliki kemampuan, kepedulian dan kemanusiaan, tanpa dukungan dari keluarga dan teman maka otomatis perempuan kurang beraktivitas.

Selain faktor internal yang dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai terdapat pula aspek yang berasal dari luar organisasi atau faktor eksternal tetapi berpengaruh dalam lingkungan organisasi. Aspek aspek tersebut antara lain:

- a. Aspek keluarga atau kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah suami dan anggota keluarga adalah anak-anak yang dapat mempengaruhi perempuan dalam beraktivitas pada partai politik. Hal ini secara konseptual bahwa motivasi merupakan salah satu fungsi yang diimbang oleh seorang perempuan atau kepala rumah tangga. Menurut hasil wawancara dengan perempuan yang beraktivitas pada paratai politik selalu mengajak perempuan untuk lebih giat berpartisipasi dengan jalan lebih giat membekali diri keterampilan yang dapat menunjang kegiatan sehari-hari dalam melaksanakan aktivitas pada partai politik. Jadi perempuan dapat lebih maju apabila didukung oleh keluarga atau suami. Karena keluargalah yang dapat dijadikan sebagai pengobat stres dalam melaksanakan aktivitas apabila terjadi permasalahan yang dihadapi.
- b. Aspek Teman sekolah. Berdasarkan indikasi dari salah satu aktivis dalam sebuah partai mengatakan bahwa salah satu aspek yang mendorong seseorang untuk beraktivitas adalah teman, sebab untuk mencapai suatu tujuan tidak akan berhasil jika tanpa ada dukungan dari orang luar untuk memberi masukan tentang

pengembangan diri dalam meraih sukses atau memberi informasi tentang visi dan misi dari salah satu organisasi yang akan diikuti.

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung tersebut di atas, tentunya ada faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan motivasi perempuan dalam beraktivitas pada partai politik. Adapun faktor penghambatnya adalah:

1. Tingkat kemampuan dan pemahaman sebahagian perempuan masih relatif kurang sehingga perlu lebih ditingkatkan sosialisasi mengenai manfaat perempuan dalam beraktivitas pada partai politik. Karena isu yang berkembang bahwa pelaksanaan politik pada umumnya kotor, sehingga perempuan pada umumnya kurang percaya diri untuk ikut aktif dalam partai politik.
2. Dukungan dana sosialisasi dari pemerintah yang relatif kurang, sehingga perempuan sebahagian kecil yang mengetahui manfaat ikut aktif dalam partai politik, yang aktif adalah perempuan yang betul-betul memiliki pemahaman akan pentingnya perempuan ikut aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan terutama pada pembangunan politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, yang telah dikemukakan di atas, maka pada bagian ini dapatlak disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Motivasi perempuan beraktivitas pada partai politik dapat dilihat dari motif dan harapan yang dimilikinya yaitu motivasi secara internal dan motivasi secara eksternal.
2. Motivasi internal, yaitu motivasi perempuan yang bersumber dari dalam dirinya untuk beraktivitas pada partai politik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa memiliki, harga diri dan aktualisasi diri.

3. Motivasi eksternal, yaitu motivasi perempuan yang betsmuber dari luar dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti dorongan dari keluarga dan lingkungan sekolah.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi perempuan baik secara internal dan eksternal adalah faktor kemampuan dan kamauan serta ditunjang dengan faktor Keluarga, faktor sosial atau teman sekolah .

Setelah memperhatikan beberapa hal yang substansial yang ada, maka penulis menyarankan.

1. Kepada pemerintah, hendaknya motivasi perempuan lebih ditingkatkan lagi dengan melakukan sosialisasi tentang manfaat perempuan ikut aktif dalam partai politik. Hal ini mutlak dilakukan agar dapat mengimbangi keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya partisipasi perempuan dalam partai politik atau keterwakilan perempuan dalam legislatif.
2. Kepada masyarakat atau perempuan, hendaknya lebih termotivasi untuk beraktivitas pada paratai politik, agar perempuan dapat duduk berdampingan dengan laki-laki dalam melaksanakan pembangunan, terutama para kaum laki-laki atau suami-suami, berilah dorongan kepada istri atau perempuan jika memiliki kemampuan dan kemauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan, Coralie, 1989, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*
- Budiardjo, Miriam, 1981, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Jakarta.
- Cinyers Diana, 1991, *Perencanaan Sosial dan Dunia Ketiga*, UGM, Yogyakarta.
- Hasibuan, 2000, *Organisasi dan Motivasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- , 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sedarmayanti, 2004, *Good Goernance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju Bandung.

Slamet, 1992, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press, Jakarta.

-----, 1992, *Konsep-konsep Dasar Partisipasi Sosial*, PAU – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.

Thoha, Miftah,-----, 2004, *Birokrasi Politik*, Gramedia, jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2002 Pasal 2 , Tentang Partai Politik.

Winardi, 2004, *Motivasi dan Pemasivasi*, Grasindo, Jakarta.